BEBERAPAKENDALADALAM MENANGGULANGI KEMISKINANDIINDONESIA

*by*PusatKarirUnitomo

Submissiondate:09-Jan-202010:21PM (UTC+0900)
SubmissionID:1239741015
Filename:BEBERAPa_kendala_menanggulangikemiskinan_diIndonesia_fix_3.pdf(135.27K)
Wordcount:2561
Charactercount:24621

BEBERAPA KENDALA DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI INDONESIA

Suyanto

Abstract : Solving the poverty can be done by increasing the life of pose people through developing the local economy. We still can ofter find some obstacles in this effort, either strategically or generally. Strategic obstacle in raising the poverty is the high of poverty number and the job less in Indonesia, the high of degradation level of natural resources and also the low of local competition. The general obstacles in solving the poverty through developing the local economy, such as the domination of political vision of Indonesian economy. It self which still does not pay attention the poverty even it seems liberclism and capitalism, so the only strong investor can increase, mean while for the local developing realization less from the poor people in making the policy so that it does not take a profit for the poor people life for long periode.

Keyworcls : Obstacle, solving the poverty

Dewasa ini telah muncul kesadaran global untuk menurunkan jumlah orang miskin di dunia sebelum tahun 2015. Pemerintah dari berbagai negara di dunia bersama dengan lembaga-lembaga internasional dan nasional telah giat mengembangkan strategi dan pendekatan yang dapat diimplementasikan untuk menurunkan jumlah orang miskin.

Banyak faktor yang menyebabkan penduduk menjadi miskin, antara lain, kondisi sumber daya alam seperti rendahnya kesuburan tanah, kekurangan air akibat rendahnya curah hujan dengan adalah merupakan kendala serius dihadapi penduduk berbagai daerah kabupaten/kota.

Selain faktor di atas, kelangkaan modal yang mudah diakses bagi penduduk miskin akses terhadap lahan akses terhadap pelayanan merupakan yang dapat da-

Suyanto adalah Fakultas Pertanian Universltas Dr. Soetomo

pat melepaskan mereka dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sosial. Semenjak kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan awal 2001 telah memperluas ruang partisipasi politik bagi kaum miskin dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah, sehingga ketimpangan ekonomi maupun sosial yang ada di masyarakat diharapkan dapat terpecahkan.

Otonomi daerah memang merupakan pr yarat penting untuk menuju perbaikan dan pemerataan kesejahteraan kaum miskin, namun [redacted] tujuan tersebut, harus ada politik ekonomi yang secara konsisten memihak kepada sektor ekonomi kaum miskin yang disertai strategi yang koheren untuk menunjang integrasi masyarakat miskin ke dalam usaha produktif dan mekanisme pasar.

Pengembarrgan ekonorni lokal untuk memerangi penduduk miskin telah menjadi isu lintas bidang dalam aktifitas kelompok-kelompok swadaya serta dalam diskusi-diskusi para pihak (stakeholders) di tingkat kabupaten. Oleh sebab itu, fokus program harus ditekankan pada upaya peningkatan produksi dan pemasaran hasil-hasil dari usaha penduduk miskin.

Pemeran utama dalam pengembangan ekonomi lokal sebenarnya ada pada lembaga-lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerinta propinsi dan pemerintah pusat, pengusaha lokal, Kamar Dagang dan Industri, serta produsen lokal yang umummnya terdiri dari para petani dan nelayan serta pengrajin industri kecil lainnya. Peran-peran mereka sering tidak dapat berjalan optirnal, karena masih adanya kendala-kendala yang dihadapi mereka.

Pada umumnya lingkungan ekonomi pemerintah [redacted] masih didominasi pengembangan ekonomi lokal oleh sektor primer, dan sebagian lainnya oleh sektor sekunder dan jasa.

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka penulis [redacted] ini penting untuk mernbantu memberikan alternatif pe cahan dalam penanggulangan kemiskinan [redacted] pemerintah [redacted] /kota [redacted], [redacted]. Masalah utama [redacted] pengentasan kemiskinan regional dilakukan serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan, baik kendala yang bersifat strategis dan yang bersifat umum ?"

[redacted] Keterbatasan [redacted]

[redacted] memaparkan upaya pengentasan kemiskinan, langkah-langkah yang harus dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi, baik kendala yang bersifat strategis yang berupa tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tingkat degradasi sumber daya alam, serta rendahnya daya saing lokal.

Tujuan lain dari penelitian ini memaparkan beberapa kendala yang bersifat umum dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, karena lemahnya visi politik ekonomi Indonesia sendiri yang kurang pro-poor, serta pelaksanaan pembangunan daerah kurang melibatkan penduduk miskin.

Beberapa Kendala Strategis dalam Menanggulangi Kemiskinan

Menurut Dendi dkk (2004), bahwa Indonesia kini sedang mengalami proses transformasi politik dan ekonomi yang dinamis, dimana proses desentralisasi yang cepat yang membawa kepada devolusi kekuasaan administrasi dan tanggungjawab kepada sekitar 400 kabupaten semenjak Januari 2001.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal telah diatur berdasarkan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004. Berdasarkan kebijakan tersebut, kita telah diperkenalkan sistem fiskal baru antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memperluas ruan partisipasi publik di daerah terutama dalam perumusan kebijakan, perencanaan , sehingga berhadapan dengan berbagai tantangan dan kendala dalam membangun kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

Selanjutnya Dendi dkk (2004), menyatakan, bahwa pengembangan ekonomi lokal yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan karum miskin, masih menemui beberapa hambatan dan kendala umum.

Kendala bersifat Strategis

Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kebijakan dan strategi pembangunan yang bersifat *pro-poor* sebenarnya telah dimulai semenjak awal kemerdekaan Indonesia hingga pemerintah orde baru dan sekarang ini dengan dikeluarkan UU kedua tersebut .

Hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan, sebenarnya telah memberikan hasil yang menggembirakan hingga sebelum terjadinya krisis yang melanda sebagian Asia dan Indonesia pa da pertengahan tahun 1997. Berdasarkan laporan resmi di Indonesia menyajikan bahwa selama pada periode tersebut jumlah penduduk dan rumah tangga miskin di Indonesia turun secara drastis (Sumodiningrat,2004 & BPS, 2004).

Krisis keuangan akhirnya meluas menjadi krisis ekonomi dan multi dimensi, krisis kepercayaan, politik dan sosial, tentunya beserta faktor-faktor akar penyebabnya pada akhirnya merusak kecenderungan keberhasilan prestasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejak pertengahan abad 20.

Sampai dengan tahun 2004,diperkirakan setengah dari penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kemiskinan.Buruknya akses pendidikan,kesehatan dan lingkungan dapat membu at penduduk Indonesia kembali masuk kedalam kategori penduduk miskin. Kehidupan mereka hanya sedikit diatas garis [redacted].

Kini sekitar 16 juta jiwa atau sekitar 7,5 persen penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan menurut standar Bank Dunia, yakni hidup dengan daya beli kurang dari 1 dolar Amerika Serikat per hari. Tetapi jumlah penduduk Indonesia yang rentan menjadi miskin, artinya mereka yang hidup dengan kurang dari 2 dolar Amerika Serikat per hari, dilaporkan jauh lebih dari jumlah tersebut, yaitu lebih dari 110 juta jiwa atau sekitar 53 persen (Soedjito, 2004)

Berdasarkan pada laporan Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004 mengungkapkan bahwa IPM (HDI-Human Development Index) Indonesia berada pada urutan ke 111 dari 177 negara. Ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang dicapai Indonesia dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakatnya relatif tertinggal dibanding negara-negara lain.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan sepasang persoalan bagaikan dua sisi mata uang. Setidak-tidaknya 10 juta orang dilaporkan tidak memiliki pekerjaan, dan bahkan mencapai sekitar 40 juta orang bila dimasukkan orang yang setengah menganggur. Penciptaan lapangan kerja sungguh merupakan tantangan besar bagi Indonesia dalam kondisi yang

belum sepenuhnya pulih dari krisis multi dimensi. Persoalan terbesar bagi Indonesia adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada.

Tingginya [redacted]

[redacted] Okehilangan [redacted] Indonesia [redacted] serta pihak terkait lainnya.

Di samping berbagai kelemahan disain pendekatan dan implementasi program, ada banyak persoalan mendasar, antara lain persepsi masyarakat yang menganggap struktur penguasaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan akibat kebijakan yang terlalu memihak kepada pengusaha besar, kebijakan yang cenderung tidak menghargai hak-hak ulayat masyarakat adat (communal property rights), kelangkaan lahan untuk kepentingan budidaya pertanian, sikap "setengah hati" para penguasa untuk menegakkan hukum dan keadilan [redacted]

[redacted] oleh degradasi lahan yang pada gilirannya juga menghasilkan efek [redacted]

[redacted]. Persoalan sumberdaya alarl ini seharusnya menjadi pusat perhatian utama bagi pemerintah, karena peranannya dalam jangka panjang sangat menentukan kehidupan bangsa kita.

Lemahnya Tingkat Persaingan Regional-Global

Adanya semangat liberalisasi ekonomi dan perdagangan memang merupakan sebuah kenyataaan, meskipun masih ada beberapa prasyarat dan aturan main yang masih diperdebatkan oleh wakil-wakil negara industri (negara maju) dengan wakil-wakil negara berkembang, termasuk [redacted] soal subsidi domestik dan ekspor yang diberikan negara-negara industri maju kepada petani dan [redacted] sebagai ancaman [redacted] saing produk - produk pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Meskipun debat akademik tentang ideologi politik ekonomi modern masih terus berlangsung dan gerakan anti gloalisasi semakin gencar dipelopori oleh para cendekiawan ekonomi tertentu serta politikus maupun elit masyarakat sipil persepsi publik bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi merupakan peluang baru bagi pengembangan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan juga semakin populer di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa globalisasi dan liberalisasi akan menciptakan taman ekonomi (*economic playing fields*) yang kompleks dan penuh resiko, karenanya kebijakan desentralisasi dan deregulasi juga dibarengi dengan upaya – upaya menyinergikan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro dan kecil menengah (sektor UMKM).

Tetapi, Indonesia masih relatif lebih rendah daya tarik investasinya dan lebih rentan terhadap resiko globalisasi dan liberalisasi ekonomi dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Australia.

World Investment Report (2004:10) mengungkapkan bahwa Indonesia berada pad posisi ke-139 dari 144 negara yang menjadi tujuan investasi dunia. Sebagai perbandingan, Brunei Darusalam berada pada urutan ke-2 setelah [redacted] pertamaa. [redacted]

[redacted] dikhawatikan [redacted] penegak [redacted] biaaya [redacted] mulai [redacted]

[redacted] realit korupsi yang belum dapat diberantas [redacted] penyebab ketidakefisienan dan ekonomi biaya tinggi di Indonesia.

Laporan Bank Dunia mengungkapkan bahwa biaya untuk memulai beriventasi Indonesia tergolong paling tinggi diantara negara-negara ASEAN, yakni sekitar [redacted], waktu yang diperlukan untuk mengurus sampai keluarnya izin bisnis di Indonesia juga terlama diantata negara-negara Asean, yakni sekitar 150 [redacted].

Persolan-persoalan tersebut seharusnya sudah menjadi perhatian kita untuk meningkatkan daya saing agar ekonomi bangsa Indcnesia menjadi lebih efisien dan maju.

Kendala yang bersifat Umum

Kurangnya visi politik ekonomi Indonesia

Bahwa adanya realita yang terjadi pada masa krisis [redacted] memiliki daya tahan atau [redacted] cendekiawan ekonomi [redacted] penyelamat ekonomi nasional dari [redacted] kebijakan baik dipusat maupun di daerah dan cerrdekiawan menjadikan sektor ekonomi rakyat sebagai tulang punggung ekonomi nasional dan kesanalah kebijakan dan dukungan difokuskan.

Perspektif ini sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimarra tertulis dalam pasai 33. Meletakkan fokus pada sektor ekonomi [redacted] bukan berarti mengabaikan sektor swasta skala besar. [redacted] (BUMN) [redacted]. rneskipun [redacted] rnemperoleh [redacted] mengurangi subsidi [redacted] mengalihkan dananya untuk bantuan modal koperasi disamping [redacted] biasanya dana kesehatan dan pendidikan, maka masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro dan [redacted] akan memperoleh keuntungan yang semakin besar dari rantai produktif dan pemasaran produk maupun jasa. Pada gilirannya akan ada dampak ekonomi, sosial dan lingkungan hidupnya.

Sektor UMKM kita semakin hari menjadi kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar, para konglomerat dalam negeri. Hal ini jelas- jelas menjadi persoalan bangsa Indonesia yang dijamin atas konstitusi untuk menghidupkan koperasi dan usaha kecil lainnya. Secara filosofis terhadap tinjauan dalam pendirian BUMN adalah dalam rangka untuk memakmurkan rakyatnya untuk kaum miskin.

Kurangnya Pembangun Daerah yang Pro-*Poor*

Kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 memberikan landasan legal yang kuat bagi strategi pengembangan ekonomi lokal.

Dewasa ini Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 207 juta jiwa lebih, yang terdiri dar i lebih dari 300 kelompok etnis dan 700 bahasa dan dialek serta beragam agama merupakan reali ta yang kompleks dan rawan konflik.

Dari perspektif ekonomi, implementasi otonomi daerah diharapkan menghasilkan nilai tam bah ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat daerah melalui peningkatan partisipasi masyaraka t dalam pasar. Pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat daerah tentunya lebih mengena l dan memahami potensi daerahnya. Tetapi, penataan birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi tersebut ternyata belum efektif dan efisien untuk mendukung peng embangan ekonomi daerah.

Birokrasi yang diciptakan terlalu "gemuk" dan kemampuan sumber daya manusianya masih belum optimal. Disamping itu pemerintah daerah pada urnumnya sangat rmementingkan peningkt an Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada peningkatan Produk sebagai upaya meningkatkan pema sukan/kemampuan keuangan daerah.

Kebiiakan yang berfokus pada PAD tersebut diimplententasikan melalui pemberlakuan berb agai macam pungutan. baik berupa retribusi. pajak maupun pembayaranpembayaran lainnya (*fees*) . Pungutan-
pungutan tersebut menambah mengganggu minat investor domestik maupun luar negeri, dan me nghambat orang miskin maupun pengusaha untuk memulai maupun mengembangkan bisnis. Jika konsisten dengan prinsip pembangunan ekonomi yang promasyarakat miskin, seyogyanya pemerin tah daerah tidak hanya memikirkan peningkatan PAD tetapi lebih kepada bagaimana memperlua s kapasitas fiska daerah dan memperluas basis produktif sektor ekonomi rakyat.

Dengan kata lain, strategi peningkatan Produk Dornestik Regional Bruto lebih relevan dari pada sekedar peningkatan PAD. Sejalan dengan itu, perluasan basis fiskal pemerintah daerah ser ta peningkatan kapasitas para perencana di daerah dalam memformulasikan kebijakan ekonomi di pandang sangat perrting untuk mendukung daerah membangun,Sinkronisasi kebijakan dan perenca naan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mesti ditingkatkan, sehingga program-program pemerintah pusat di daerah yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi bisa terlaksana sec ara efektif dan efisien. OIeh sebab itu, diperlukan "payung nasional" (Blue Print) pembangunan e

konomi yang dapat menjadi acuan daerahdaerah untuk menciptakan sinergi pembangunan nasiona l.

Dengan perspektif daerah rnembangun, peningkatan akses dan partisipasi masyarakat luas (*civil society*) dalam perumusan politik ekonomi, kebijakan pembangunan dan pengawasan anggara n menjadi sesuatu yang penting. Untuk tujuan ini diperlukan regulasi yang fleksibel yang menumb uhkan dan menggiatkan dialog *stakeholders* (forum *stakeholders*) mulai dari tingkat desa sampai k e tingkat nasional.Sekarang ini forumforun *stakeholders* memang telah mulai banyak bermunculan di tingkat pusat, namun harnpir semuanya sangat tinggi ketergantungan finansialnya kepada donor dari luar negeri.

Dalam pembangunan daerah ini yang perlu lebih diperhatikan adalah bagaimana peningkat an partisipasi publik utamanya kaum miskin ikut dalam perencanaan dan pernbuatan program unt uk meningkatkan kehidupan mereka rnenjadi lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan rnelalui pengembangan ekonomi lokal dapat meningkatkan kehidupan kaum miskin, meskipun di lapangan masih banyak kita menemui beberapa hambatan dan kendala, baik kendala yang bersifat strategis maupun bersifat umum. Kendala yang bersifat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ini meliputi: (1) [redacted] (2) adanya degradasi sumber daya alam yang semakin tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian serius; serta (3) adanya upaya peningkatan daya saing regional-global. Sedangkan kendala-kendala yang bersifat umum dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, diantaranya adalah : visi politik ekonomi Indonesia sendiri masih yang kurang berpihak pada pro-*poor*. bahkan cenderung pada liberalisme dan kapitalisme, sehingga pemodal yang kuat yang dapat berkembang, sementara dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurang melibatkan penduduk miskin dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini kurang menguntungkan penduduk miskin dalam jangka panjang.

Saran

Penanggulangan kemiskinan seharusnya menjadi perhatian semua pihak yang terkait yang dapat dilakukan melalui: (1) pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kehidupan kaum miskin; (2) upaya pengentasan kemiskinan harus selalu dilakukan dengan mengurangi berbagai kendala dan hambatan yang ada, baik yang bersifat strategis, maupun yang bersifat umum; (3) kendala-kendala yang bersifat strategis terutama mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mengurangi degradasi sumber daya alam. serta meningkatkan daya saing bagi daerah. Sedangkan kendala yang bersifat umum adalah membangun visi politik ekonomi Indonesia yang pro-*poor* serta meningkatkan peran kaum miskin dalam pembangunan daerah.

Daftar Rujukan

Alisyahbana, Fisikal tarrggal .

BPS, BAPPENAS, UNDP, .

, Yogyakarta: .

_____, Dalarm

Azaz . *Puper* disampaikan

, I I . Jakarta.

Dendi, A., Heile, J.H., Mahman dkk, , Kerjasama Departemen Dalamnegeri Dirjen dengan gtz .

. Jakata: .

. 43 hlm 3-7, Jakarta.

dari ,

Perencanaan, . Jakarta:

, Moh. ,

fisiensi

), disertai Universitas Brawijaya (dipublikasikan).

Semeru.

.

Mahi, R. .

Internasioanl . *Analisis CSIS*. 31 (4):422-435.

Majidi,

: L.PES.

Mubyarto. 2000. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta : BPFE.

Nangga, Muangga.

".

Thesis PPS UGM, Yogyakarta.

Direk-torat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomika UGM, Yogyakarta.

Rachbini, .2002. *Potitik;* .

206 pp. Jakarta: .

Sinring, Bahar. 2002 : 65-66. .

Sulawesi Selatan. Disentasi Universitas Airlangga,

Surabaya.

aplikainya .

. Jakarta: .

Sarundajang. 2001. .

Sumodiningrat, Gunawan. . *Pembangunan Daerah* *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta : Bina Rena Perwira.

. Jakarta: .

. Yogjakarta: .

.

. Jakarta: .

Todaro, , 2000. .

, R.2004. , 175 pp. .

[redacted].

Peraturan Perundang-undangan

19 [redacted] 5 [redacted] 1974 [redacted] *Pokok-Pokok* [redacted]

di [redacted].

2 [redacted]

[redacted] rnenjadi [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] menjadi [redacted].

BEBERAPAKENDALADALAM MENANGGULANGI KEMISKINANDIINDONESIA

ORIGINALITYREPORT

21%	17%	8%	11%
SIMILARITYINDEX	INTERNETSOURCES	PUBLICATIONS	STUDENTPAPERS

PRIMARYSOURCES

1	web.iaincirebon.ac.id InternetSource	8%
2	id.scribd.com InternetSource	3%
3	ejurnal.unikarta.ac.id InternetSource	2%
4	www.neliti.com InternetSource	2%
5	www.conscientiabeam.com InternetSource	1%
6	vdocuments.site InternetSource	1%
7	SubmitedtoiGroup StudentPaper	1%
8	ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id InternetSource	1%

9	id.123dok.com InternetSource	1%
10	core.ac.uk InternetSource	1%
11	repositori.uin-alauddin.ac.id InternetSource	1%
12	www.usu.ac.id InternetSource	1%
13	repository.unhas.ac.id InternetSource	1%
14	contohcara.blogspot.com InternetSource	1%
15	journal.unair.ac.id InternetSource	1%
16	repository.unair.ac.id InternetSource	<1%
17	ekp.fe.um.ac.id InternetSource	<1%
18	documents.worldbank.org InternetSource	<1%
19	pt.scribd.com InternetSource	<1%

20	www.scribd.com InternetSource	<1%
21	abahrumadi.blogspot.com InternetSource	<1%
22	SubmitedtoSTIKOM Surabaya StudentPaper	<1%
23	blogkab-pringsewu.blogspot.com InternetSource	<1%
24	SubmitedtoUniversitasAirlangga StudentPaper	<1%
25	SubmitedtoUniversitasJember StudentPaper	<1%

Excludequotes Of Excludematches Of

Excludebibliography Of

BEBERAPAKENDALADALAM MENANGGULANGI KEMISKINANDIINDONESIA

PAGE1

PAGE2

PAGE3

PAGE4

PAGE5

PAGE6

PAGE7

PAGE8

PAGE9

PAGE10

PAGE11

PAGE12